



GEREJA DAN NEGARA DALAM SEJARAH INDONESIA

Martinus Loghe Bondi.1

[**martinusloghebondi@gmail.com**](mailto:martinusloghebondi@gmail.com)

STT Galilea Indonesia

Paulina Wini Tada.2

STT Galilea Indonesia

[**Paulinawinitada81@gmail.com.**](mailto:Paulinawinitada81@gmail.com)

STT Galilea Indonesia

Abstrak

Jurnal ini membahas dinamika relasi gereja dan negara dalam sejarah Indonesia, meliputi masa kolonial, awal kemerdekaan, Orde Baru, dan era Reformasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis dan analisis deskriptif-kualitatif untuk menelusuri perubahan pola hubungan antara institusi gereja dan kekuasaan negara dalam konteks sosial-politik yang berbeda. Pada masa kolonial, gereja cenderung berada dalam posisi subordinatif dan terintegrasi dengan struktur kekuasaan pemerintah kolonial. Memasuki masa kemerdekaan, relasi tersebut mengalami transformasi dalam kerangka negara Pancasila yang mengakui peran agama dalam kehidupan publik tanpa menjadikannya sebagai agama negara. Pada era Orde Baru, hubungan gereja dan negara berlangsung dalam sistem politik yang terkontrol, sedangkan era Reformasi menghadirkan ruang demokratisasi dan kebebasan beragama yang lebih luas, meskipun diwarnai tantangan intoleransi. Kajian ini menyimpulkan bahwa relasi gereja dan negara di Indonesia bersifat dinamis dan kontekstual, dengan model ideal berupa kemitraan kritis-konstruktif dalam kerangka nilai-nilai Pancasila.

Abstract

This study examines the dynamics of church–state relations in Indonesian history, covering the colonial period, the early independence era, the New Order regime, and the Reformasi era. Employing a historical approach and descriptive-qualitative analysis, this research explores the changing patterns of interaction between church institutions and state authority within different socio-political contexts. During the colonial period, the church tended to occupy a subordinate position and was often integrated into the colonial power structure. In the early independence period, this relationship transformed within the

framework of Pancasila, which recognizes the role of religion in public life without establishing a state religion. Under the New Order regime, church state relations operated within a tightly controlled political system, while the Reformasi era introduced broader democratization and religious freedom, accompanied by emerging challenges of intolerance. This study concludes that church–state relations in Indonesia are dynamic and contextual, with an ideal model characterized by a critical-constructive partnership grounded in the values of Pancasila.

Kata kunci: Gereja dan Negara; Sejarah Indonesia, Relasi agama dan Politik, Pancasila, Kekebasan Beragama.

PENDAHULUAN

Pada tahun 1605 pernah terjadi studi kasus agama Kristen sudah tidak lagi merupakan barang asing di Kepulauan Nusantara. Mungkin sekali pedagang-pedagang Kristen dari Khalifat Arab atau dari India Selatan menginjakkan kaki di Indonesia mulai dari abad ke-7 atau ke-8 M. Pada tahun 1323-1324 seorang anggota Ordo Fransiskan, Oderico de Pordenone, mengunjungi Kalimantan, istana Majapahit, dan Sumatera. Dua puluh tahun kemudian seorang utusan Sri Paus bertemu dengan sejumlah orang Kristen di Sumatera. Akan tetapi, pada zaman ini agama Kristen belum berakar di bumi Indonesia.

Sejarah Gereja Indonesia yang dipaparkan akan lebih banyak menyinggung tentang Gereja-gereja Katolik dan Protestan arus Calvinis dan Lutheran. Selain itu, pembahasan juga berkisar pada Gereja-gereja kelompok Pentakosta dan denominasi lainnya yang masuk ke Indonesia pada abad ke-19 dan 20.¹ Hubungan antara gereja dan negara merupakan tema pokok dalam kajian teologi dan sejarah bagi Indonesia. Indonesia sebagai negara majemuk secara agama tidak menjadikan agama tertentu sebagai agama negara, tetapi menjamin kebebasan beragama melalui nilai-nilai Pancasila dan UUD Dasar 1945 yang mengatur kebebasan rakyat. Menurut Zulfikar Putra, Indonesia adalah negara majemuk yang terdiri dari beragam suku, ras dan agama, yang berbeda beda sehingga diperlukan toleransi dalam memahami semua perbedaan yang ada, begitu juga pada lembaga pendidikan kultur warganya juga beraneka ragam.² Sejarah Gereja Indonesia menunjukkan bahwa keberagaman denominasi dan hubungan harmonis antara gereja, negara, dan masyarakat majemuk menjadi dasar penting dalam membangun toleransi dan persatuan bangsa.

¹ Surimawati Laia1, Yuslina Halawa, “*Sejarah Gereja di Indonesia : Peran Misionaris Dalam Penyebaran Kekristenan*,” Jurnal Silih Asah Volume 2 Nomor. 1, (2025), Hal. 2, DOI: <https://doi.org/10.54765/silihasah>.

² Zulfikar Putra, SH., M.Pd. dan Dr. H. Farid Wajdi, S.Pd.I., M.Si. *Buku ajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan panduan kuliah di perguruan tinggi*, (Malang: [Ahlimedia Book](#), 2021), Hal 1

Kata gereja merupakan terjemahan kata Yunani ekklesia yang secara harafiah berarti dipanggil keluar. Ek artinya keluar, kaleo berarti memanggil. Jadi ekklesia berarti dipanggil ke luar dari kehidupan lama dan masuk ke dalam persekutuan dengan Yesus Kristus.³ Jadi gereja bicara tentang orang-orang yang di bawah keluar dari gelap menjadi anak terang dalam sikap, karakter dan tindakannya. Karena Yesus menggunakan kata itu dalam Matius 16:18 ketika mengatakan: “Aku mendirikan ekklesian (jemaatKu)”. Kemudian dalam 1 Petrus 2:9-10 rasul Petrus mendefinisikan gereja sebagai persekutuan orang-orang yang dipanggil ke luar dari kegelapan dunia, masuk ke dalam terang Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kata gereja dalam bahasa Yunani kadang-kadang disebut sebagai kuriakon atau kuriakos yang berarti milik kepunyaan Tuhan.⁴ Gereja sebagai menegaskan identitas umat percaya yang dipanggil keluar dari kegelapan untuk hidup dalam terang dan menjadi milik Tuhan melalui persekutuan dengan Yesus Kristus.

Menurut (H Berkhof, dan Dr. I.H. Enklaar), Permulaan sejarah Gereja dapat di pelajari dari kitab Kisah Rasul-rasul (Kira-kira 70-140 M) terjadi perubahan-perubahan besar dalam Gereja kristen, baik secara lahiriah, maupun secara bataniah. Sangat pesat berkembang kemana-mana.⁵ Jadi gereja bicara tentang kumpulan orang-orang percaya yang di panggil dari gelap (kehidupan dalam dosa) kepada terang Kristus (dalam kebenaran Firman Tuhan).

Dalam perkembangan Gereja dan negara dalam Sejarah di Indonesia mengalami banyak dinamika. Di lihat dari pengertian negara adalah entitas politik yang memiliki kedaulatan atas wilayah dan penduduknya sendiri. Pemerintahan, hukum, dan identitas kewarganegaraan adalah beberapa komponen penting dari konsep negara.⁶ Negara adalah pemegang kuasa, pembuat aturan, dan menjalankan aturan dengan entitas politik yang jadi bagian dari kehidupan negara. Bahkan dari kolonial sampai zaman modern gereja dan`negara mengalami tekanan-tekanan baik dari luar maupun dari dalam.

Gereja pernah berada dalam bayang-bayang kekuasaan kolonial, namun kemudian dituntut untuk mengambil posisi yang lebih mandiri dan kontekstual dalam negara merdeka. Penelitian selalu membahas masuknya kekristenan awal ke Indonesia, Zaman VOC dan gereja Protestan, Pekabaran injil oleh misionaris Barat, Pertumbuhan Gereja di daerah tertentu. Sementara hubungan gereja dan negara berkembang dalam sejarah Indonesia serta peran gereja dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kurang di perhatikan. Oleh karena itu

³Allen W. Graves, “A Church At Work: A Handbook of Church Polity,” (Nashville: Convention Press, Thn. 1972), hal. 4.

⁴Henk ten Napel, “*Kamus Teologi Inggris – Indonesia*,” (Jakarta: BPK Gunung Mulia, Thn. 2002), Hal. 77.

⁵ H.Berkhof dan Dr. I. H. Enklaar, “*Sejarah Gereja*”, (Jakarta: PT.BPK Gunung Mulia, 1999), Hal.10

⁶ Humairah Almahdali, “*Ilmu Negara*”, (Padang: CV. Gita Lentera, 2023), Hal.7.

penting sekali bagaimana mengkaji hubungan gereja dan negara berkembang dalam sejarah Indonesia serta peran gereja dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Menurut Denzin dan Lincoln (1994) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.⁷ Menurut Erickson (1968) menyatakan bahwa penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan penggambaran secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan perilaku manusia dalam konteks sosialnya secara mendalam melalui pengamatan.⁸

Menurut Kirl dan Miller (1986), penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang berupaya memahami realitas sosial dari perspektif subjek penelitian melalui pengamatan terhadap makna, tindakan, dan interaksi sosial dalam konteks alamiah.⁹ Kesimpulan dari pandangan diatas mengenai metode penelitian kualitatif adalah memahami makna dan realitas sosial secara mendalam dari perspektif subjek dalam konteks alamiah, dengan menekankan proses, pengalaman, dan keabsahan data kualitatif.

Dalam jurnal ini berjudul *Gereja dan Negara dalam Sejarah Indonesia*, metode penelitian kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam hubungan antara gereja dan negara dalam konteks sosial, budaya, dan sejarah Indonesia melalui pengamatan, penafsiran, serta analisis naratif terhadap berbagai peristiwa, pemikiran, dan peran gereja dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

PEMBAHASAN

Gereja dan Negara pada masa kolonial

Kekristenan hadir pada masa penjajah seperti Portugis juga hendak menjadikan semua bangsa jajahannya menjadi penganut agama Katolik. Pada tahun 1546-1547, Fransiskus Xaverius, rasul Asia, mulaiewartakan Injil dan membaptis di sana dan sejak itu Misi agama Katolik pun dimulai.¹⁰ Misi Katolik ke kepulauan Nusantara datang bersama dengan penjajah Portugis. Portugis dan Spanyol, dalam System Padroado, melaksanakan pesan Paus untuk

⁷ Norman K. Denzin dan yvonna S. Lincoln, “*Handbook of Qualitative Research*”, (Thousand Oaks, CA: Sage Publication, 1994), Hal. 2.

⁸ Frederick Erickson, “*Qualitative Methods in Research on Teaching*, ed. Merlin C. wittock (New York: Macmillan, 1986), Hal. 119.

⁹ John Kirk dan Marc L. Miller, “*Reliability and validity in Qualitative research*”, (Beverly Hills: Sage Publications, Thn. 1986), Hal.9.

¹⁰ Subanar, G.B., *Menuju Gereja Mandiri, Sejarah Keuskupan Agung Semarang di bawah Dua Uskup, 1940-1981*, (Yogyakarta: Penerbit Universitas Sanata Dharma, Thn. 2005), hlm. 19.

memajukan, mendorong, dan melindungi karya suci Injil. Tercatat tahun 1543 Portugis mendarat di Halmahera. Gereja Katolik di Indonesia hadir bersama mereka.

VOC kemudian berhasil mengambil-alih seluruh kekuasaan Portugis dan Spanyol pada tahun 1666. VOC, nota bene membawa Protestantisme yang keras dan eksklusif dari Belanda dan hanya melindungi, memelihara dan menghendaki penyebaran Protestantisme. VOC tidak memberikan kebebasan beragama. Kehadiran kolonialisme Belanda di Indonesia oleh VOC (1602-1799) menjadi alasan utama pencarian rempah-rempah. Pada mulanya perjanjian antara pemerintah Belanda dan VOC tidak memuat ketentuan apapun mengenai agama Kristen. Meskipun demikian pada tahun 1623 VOC diwajibkan untuk menyebarkan misi agama Kristen. Oleh karena itu, pekerjaan misionaris Kristen dimasukkan ke dalam struktur VOC dan menjadi bagian dari Kementerian Perdagangan dan Jajahan.¹¹

Penyebaran misi Protestan di Indonesia meliputi 2 tahap yakni pada masa VOC (1602-1799) dan pada masa Hindia Belanda (1800-1942). Oleh pemerintah Belanda, VOC diharuskan menyebarkan misi Kristen, hal itu tercantum dalam pasal ikatan kontrak antara VOC dan pemerintah Belanda tentang kekristenan, oleh sebab itulah dalam struktur VOC terdapat sebuah bidang yang memuat misi kekristenan yang menjadi bagian dalam Department of Education, Worship and Industry.¹²

Menurut Wendy Sepmady Hutahaean Sejarah Gereja Indonesia adalah kisah tentang aktifitas misionaris (misi) dan respon orang-orang di Nusantara terhadap panggilan Yesus Kristus melalui pemberitaan Injil oleh para misionaris (Nestorian di Barus, Gereja Katolik dari Eropa, zending dari Belanda, dan Negara-negara lain), yang bermisi ke Nusantara pada abad ke 7-19.¹³ Gereja hadir di Indonesia adaalah kegiatan bermisi yang dilakukan gereja katolik bahkan Belanda. Menurut Willyanto P. Ontonuwu, Sejarah gereja di Indonesia adalah bagian atau salah satu mata rantai dari sejarah gereja di belahan dunia khususnya Asia. Ada benang merah yang menghubungkan masuknya kekristenan di Indonesia dengan daerah-daerah lain di Asia yang telah terjangkau oleh Injil.¹⁴

¹¹ Surimawati Laia1, Yuslina Halawa, "Sejarah Gereja di Indonesia : Peran Misionaris Dalam Penyebaran Kekristenan," Jurnal Silih Asah Volume 2 Nomor. 1, (2025), Hal. 2, DOI: <https://doi.org/10.54765/silihasah>.

¹² La Ode Muhammad Rauda Agus Udaya Manarfa, S.Sos, M.Si. Suharni suddin, S.Pd., M.Pd. Liza Husnita, M. Pd. Dr. Meri Erawati, S.S. M.Hum. Meldawati, M.Pd. Juliandry Kurniawan Junaidi M. Pd. Dr. Ika Fariyah Hentihu, S.Pd, M.Pd. Kaksim, M.Pd. Arditya Prayogi, Budi Juliardi, SH., M.Pd. Dr. Zulfa, M.Pd, M.Hum., Ahmad, S.Pd., M.Pd., "SEJARAH NASIONAL INDONESIA," (Sumatera Barat: Penerbit CV. Gita Lentera, Thn. 2024), Hal. 66.

¹³ Dr. Wendy Sepmady Hutahaean, S.E., M.Th., "SEJARAH GEREJA INDONESIA", (Malang: Ahlimedia Press IKAPI, Thn. 2017), Hal. 6-7.

¹⁴ Willyanto Pontonuwu, M.Pd, "Sejarah Gereja Indonesia", (Semarang : TERA KATA, Thn.2019), Hal.2.

Menurut Willyanto P. Ontonuwu, Umat Kristen di Indonesia tidak akan menyangkali kenyataan bahwa: berita Injil dibawa ke Indonesia melalui orang-orang kulit putih yang pada waktu itu datang ke Indonesia untuk mengeruk harta kekayaan bumi Indonesia. Mereka datang dengan memperkenalkan diri sebagai penjajah Indonesia. Mula-mula datang bangsa Portugis, sementara itu bangsa Spanyol juga coba untuk berkuasa di Indonesia, tetapi karena pasang surut berhasil, mereka mengalihkan perhatiannya ke Philipina. Satu abad kemudian datanglah bangsa Belanda.¹⁵

Pada masa kolonial Belanda, gereja Kristen sering dikaitkan dengan kepentingan pemerintah kolonial. Menurut Ps. Dr. Spencer Ripelhot Hutapea Kolonialisme ekspansi kekuatan Eropa yang membawa gereja ke dalam proyek imperial global, menciptakan dinamika kompleks antara pewartaan injil dan dominasi budaya.¹⁶ Menurut Christian De Jonge, dalam daftar propinsi gerejawi Nestorian yang disusun oleh Obed Yesu pada tahun 1316, propinsi di Dabag, Sin (Tiongkok) dan Masin (India) disebut dalam posisi ke 15. Mungkin Dabag ini yang dimaksud adalah pulau Jawa dan Sumatera.¹⁷ Kehadiran gereja ada kaitannya dengan kolonial yang memiliki kepentingan-kepentingan di dalamnya.

Menurut Christian De Jonge, beberapa literatur terkenal, terutama dari kalangan Gereja Katolik Roma, menyebut bahwa agama Kristen telah hadir di Indonesia melalui kedatangan sejumlah pedagang beragama Kristen Nestorian dari Timur Tengah sejak abad ke-7, yaitu di pelabuhan Pancur di pantai barat Sumatera Utara.¹⁸ Menurut Thhomas Van Den End, pertama-tama telah terbukti tanpa adanya keragu-raguan bahwa sebuah Gereja Nestorian telah meluas ke India pada abad ke-6, ke Srilangka pada abad ke-6, ke Asia tengah pada abad ke-5 dan ke Tiongkok pada tahun 635.¹⁹

Dalam setiap pergerakan di bidang keagamaan, dapat ditemukan fakta sejarah bahwa pergerakan-pergerakan tersebut sangat berkaitan erat dengan permasalahan doktrinal, sosial, kemasyarakatan, budaya, maupun di bidang politik. Pergerakan-pergerakan keagamaan tersebut kemudian melahirkan perlawanan atau protes, akibat adanya ketidakadilan dan tekanan yang berlebihan. Lahirnya Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM) di era sebelum kemerdekaan Indonesia, menunjukkan hubungannya dengan pergerakan-pergerakan keagamaan secara umum.

¹⁵ Willyanto Pontonuwu, Ontonuwu M.Pd, "*Sejarah Gereja Indonesia*", (Semarang : TERA KATA, Thn.2019), Hal.11.

¹⁶ Ps. Dr. Spencer Ripelhot Hutapea, S.E., M.A., D.Th. "*Buku Ajar Pendidikan Agama Kristen dan Katolik Pengantar Sejarah, Dasar Teologis, Teori dan Aplikasi*", (Jawa Tengah: PT. Revormasi Jangkar Philosophia, Thn. 2026), Hal.82.

¹⁷ Christian De Jonge, "*Gereja Mencari Jawab*", (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006), 31.

¹⁸ Christian De Jonge, "*Sejarah Gereja Katolik Indonesia*", Jilid 5 (Bandung Kanisius, Thn. 2001), Hal. 19.

¹⁹ Thhomas Van Den End. "*Harta Dalam Bejana*", (Jakarta: BPK Gunung Mulia, Thn. 2012), Hal. 33.

Hal tersebut dapat dilihat secara historis yang dimulai dari orang Belanda selama abad XIX datang dan memeras tanah Minahasa yang subur serta memaksa penduduknya bekerja untuk mengisi kas negara. Di sisi lain, kurun waktu tersebut merupakan periode perkembangan kekristenan di Minahasa.²⁰ Menurut Van den End & J. Weitjens, Kolonialisasi dan kekristenan nampak secara jelas berjalan beriringan. Pemerintah kolonial Belanda berusaha mempertahankan kekuasaannya, termasuk memakai institusi gereja sebagai bagian dari pemerintahan.²¹ Gereja hadir di Indonesia melalui penjajah yang datang dengan maksud menguasai hasil bumi bangsa Indonesia dan mengambil kekayaan Indonesia dengan tidak adil.

Menurut Richard M. Daulay, Lebih lanjut mengenai hal itu, menyatakan bahwa penjajah Belanda melakukan berbagai upaya untuk melanggengkan kekuasaan, termasuk mendorong proses penginjilan di daerah tertentu, tetapi tujuan Belanda datang ke Indonesia bukanlah untuk mengkristenkan Indonesia, melainkan untuk mengambil kekayaan Indonesia demi kepentingan ekonomi negara penjajah itu.²² Pada masa kolonial injil di beritakan tetapi masyarakat di Indonesia mengalami kesulitan untuk bebas dalam mempergunakan hasil buminya. Tekanan demi tekanan di alami rakyat Indonesia, hasil buminya di beli dengan harga rendah, dan di paksa bekerja untuk bangsa kolonial yang menjajah pada waktu itu.

Menurut David E. F. Henley, Karya Yesus Kristus tentang keselamatan harus dihadirkan juga di masa kolonialisasi Belanda. Gerakan dari tokoh-tokoh Kristen Minahasa menjadi keharusan, meskipun mendapatkan banyak tantangan. Orientasi pergerakan tidak dilakukan lewat peperangan tetapi dilakukan dengan upaya-upaya persuasif dan diplomasi. Dari pandangan tersebutlah hadir suatu wujud nasionalisme di Minahasa mulai berkembang akibat ketidakpuasan terhadap pemerintah kolonial Belanda yang memberlakukan sistem pembedaan penduduk ke dalam golongan-golongan tertentu (stratifikasi sosial).²³

Menurut Van den End & J. Weitjens, Pembedaan penduduk tersebut bukan hanya terjadi di organisasi pemerintahan, tetapi juga terjadi di dalam sistem gereja. Para pendeta pribumi di Minahasa selama puluhan tahun hanya menjadi bawahan atau pendeta pembantu, mereka tidak secara leluasa melakukan tugas-tugas kependetaan (misalnya pelayanan sakramen).²⁴ Maka ada pergerakan nasionalisme.

²⁰ Changlie Harter Assa, "*Sejarah Lahirnya Gereja Kebangsaan di Minahasa The History of The Church of Nation in Minahasa*", Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani Volume 1, No 2, ((2021), Hal. 108.

²¹ Van den End & J. Weitjens, "*Ragi Carita 2: Sejarah Gereja Di Indonesia 1860-an – Sekarang*" (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1999). 85

²² Richard M. Daulay, "*Agama Dan Politik Di Indonesia*" (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015). 3

²³ David E. F. Henley, "*Nationalism and Regionalism in a Colonial Context Minahasa in the Dutch East Indies*" (Australian: National University, 1992). 255

²⁴ Van den End & J. Weitjens, "*Ragi Carita 2: Sejarah Gereja Di Indonesia 1860-an – Sekarang*", (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1999). 66

Menurut Gerry van Klinken, Minorities, Salah satu kelompok masyarakat di wilayah kolonial Belanda yang ikut melakukan pergerakan nasional adalah kelompok Kristen di Minahasa. Pergerakan nasionalisme orang-orang Minahasa, telah muncul sejak tahun 1858, disaat Lambertus Mangindaan sebagai pengkhotbah pertama Minahasa, mulai mengkhotbahkan protes-protes terhadap usaha pengambil-alihan misi Nederlandsch Zendeling Genootschap (NZG) oleh Indische Kerk.²⁵ Khotbah awalnya diambil dari Yohanes 9:5, 8:12, 12:36, dengan tema Yesus Kristus Terang Dunia, ia menyerukan agar gereja Minahasa harus berdiri sendiri.

Menurut Schouten Etnis Minahasa melakukan penolakan terhadap kebijakan pemerintahan Hindia Belanda, lebih sering dilakukan dengan cara-cara non-kooperatif yang tidak secara frontal. Sehingga kontak senjata secara langsung, sangat jarang terjadi. Nanti di akhir abad ke-19 penduduk Minahasa mulai melakukan perlawanan dengan senjata yang diberikan Belanda, yaitu budaya baca dan tulis.²⁶ Akibat adanya pengalihan dari NZG ke Indische Kerk. Guru-guru zending yang mulai tahun 1915 bergabung dalam perhimpunan Pangkal Setia di bawah pimpinan J.U Mangoal, mulai bersikap anti pemerintah dan mulai berusaha mendirikan gereja sendiri.²⁷ Itulah sejarah gereja pada masa kolonial ketika hadirnya kekristenan di Indonesia dengan dibawah oleh penjajah yang memiliki motif menguasai bukan untuk mengkristenkan Indonesia.

Gereja dan negara pada masa awal Kemerdekaan

Setelah tahun Kemerdekaan tahun 1945, Indonesia tidak memilih menjadi negara agama maupun negara sekuler murni. Menurut Dr. T.B Simatupang, Selama dalam kedudukan jepang, bangsa kita dan juga gereja-gereja kita mengalami berbagai macam ujian yang telah memberikan bekal perjuangan kemerdekaan yang di mulai dengan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 agustus 1945. Dalam tahun 1945-1949 Bangsa kita menjalankan konsolidasi kedalam dan perang kemerdekaan yang di selingi oleh perundingan-perundingan keluar. Orang-orang kristen mengambil bagian penuh dalam perjuangan itu sebagai warga negara yang setia dari negara pancasila.²⁸ Jadi Gereja mengalami tantangan pada masa awal kemerdekaan namun juga terlibat dalam memperjuangkan kemerdekaan indonesia.

²⁵ Gerry van Klinken, Minorities, "Modernity and the Emerging Nation; Christian in Indonesia, a Biographical Approach", (Leiden: KITLV Press, 2003), 102.

²⁶ Schouten M.J.C, "Myth and Reality in Minahasan History: The Waworuntu-Gallois," Confrontation (Paris: Archipel, 1987), 34.

²⁷ Van den End & J. Weitjens, "Ragi Carita 2: Sejarah Gereja Di Indonesia 1860-an – Sekarang", (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1999). 85–87

²⁸ Dr. T.B Simatupang, "Realisme Yang Berpengharapan", (Jakarta: Dewan Gereja-Gereja di Indonesia, Thn. 1981), Hal. 27-28.

Menurut M.D. Wakkary, pada tanggal 17 Agustus 1945 dua putra bangsa; Soekarno-Hatta atas seluruh rakyat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Suatu kemerdekaan yang sudah di rindukan, didambakan dan kemudian di perjuangkan. Kemerdekaan mengalami masa penuh tantangan dan perang harus berkobar yang kita kenal dengan perang kemerdekaan atau revolusi fisik sampai kolonialisme Belanda mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Selesai revolusi, negara kita juga terus bergumul dengan berbagai pemberontakan, mulai dari DI/TII, PRRI/PERMESTA sampai ke G 30 S/PKI pada tahun 1965.²⁹ Negara Indonesia ketika berhasil, mendapatkan pengakuan kemerdekaan dari pihak penjajah. Kemerdekaan yang telah di dambakan sudah di dapatkan, namun tidak terlepas dari serangan musuh dan pemberontakan dari berbagai pihak.

Menurut Dr. Dcmmulder, dari tanggal 17 september sampai dengan tanggal 24 september tahun 1985 telah diadakan suatu konsultasi antara wakil-wakil dari gereja-gereja di Indonesia dan Gereja-gereja di negara Belanda bertempat di Dhyana Pura, Kuta-Bali. Konsultasi itu mula-mula direncanakan oleh persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) dan dewan Gereja-gereja di Negeri Belanda (Raad Van Kerken in Nederland, DGN). Salah satu sebab ialah bahwa Gereja Roma-Katolik di negeri Belanda menjadi anggota penuh dari DGN, sehingga bagi DGN ada dua mitra di Indonesi, yaitu baik PGI maupun MAWI (Majelis Agung Waligereja). Sebab yang kedua ialah bahwa di Indonesia, Gereja-gereja Protestan dan Gereja Katolik secara bersama menghadapi persoalan-persoalan dan tantangan-tantangan yang merupakan oleh keberadaan mereka di tengah-tengah masyarakat indonesia.³⁰

Lalu bagaimana peran kekristenan dalam mewujudkan partisipasi memilih pemimpin yang memiliki kapabilitas seperti Soekarno, yang akan menahkodai Indonesia lima tahun ke depan. Ketika menjelaskan tentang minat dan pilihan politik orang Kristen dalam pemilu, Aritonang menemukan bahwa dibanding era sebelumnya, era Reformasi menunjukkan lonjakan besar antusias orang Kristen terlibat dalam kehidupan politik.³¹ Jadi Gereja juga sangat berperan penting dalam partisipasi memilih pemimpin.

3. Relasi Gereja dan Negara Pada Masa Orde Baru

Pada masa Orde Baru (1966-1998), pemerintah mengakui enam agama resmi, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu (diakui pada tahun 2000). Meskipun demikian, terdapat beberapa kebijakan yang dinilai membatasi kebebasan

²⁹ M.D. Wakkary, "*Siap Menghadapi Peperangan Rohani*," (Pare: Dep. Lit. dan M.M. MP-GpDI, Thn 1996), Hal. 124.

³⁰ Dr. Dcmmulder, "*Menyongsong tahun 2000*," (Jakarta: BPK Gunung Mulia, Thn. 1987), Hal.1.

³¹ Aritonang, Jan S. "*Minat dan Pilihan Politik Orang Kristen Indonesia 1955–2009: Sebuah Kajian Historis Teologis*," *Studia Philosophica et Theologica* Vol. 9, No. 2 (2009), Hal.191–213.

beragama, seperti pembatasan pembangunan rumah ibadah dan penyebaran ajaran agama tertentu.³² Menurut M.D. Wakkary, dalam alam orde baru Indonesia pembangunan yang pesat diberbagai bidang kehidupan rakyat. Dua puluh lima tahun pembangunan nasional jangka panjang kedua. Ada beberapa hal yang perlu di lakukan gereja pada Yubelium 50 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia: Pertama melipatgandakan syukuran kita kepada Tuhan untuk anugerah Kemerdekaan dan berkat kebangunan kepada bangsa dan negara kita. Kedua Naikkan doa syafaat kepada Tuhan untuk kelanjutan negara kita berdasarkan pancasila.³³

Richard Robison, secara spesifik menggambarkan yang paling menonjol dalam 18 tahun pertama perjalanan Orde Baru ialah (1) pemerintahan militer otoriter; (2) sentralisasi pemerintahan; (3) pengambil-alihan kekuasaan negara oleh para petinggi militer; (4) disingkirkannya partai-partai politik dari partisipasi efektif dalam proses pengambilan keputusan; dan (5) ketiadaan mekanisme yang jelas dan mendominasi pengaruh politik terhadap negara dari kelas sosial manapun.³⁴ Gereja memiliki peran dalam pendidikan moral, sosial, serta memperjuangkan martabat manusia dan mendukung reformasi keadilan bangsa tetapi negara justru menjadi negara otoriter. Dimana pemerintah yang berdaulat penuh memegang kekuasaan, bukan lagi masyarakatnya.

Pentingnya posisi politik menurut Maswadi Rauf karena alasan psikologis, yakni sebagai orang yang dihormati, berkuasa, memiliki akses memutuskan keputusan politik, adanya kesempatan memperoleh sumber-sumber daya, dan untuk mewujudkan cita-cita dan aspirasinya.³⁵ Gereja adalah umumnya pendirian partai politik bahkan melibatkan dirinya dalam partai politik sebagai manusia yang memiliki hak berpolitik. Manusia, kata Plato adalah makhluk politik (*zoon politicon*), sehingga di dalam diri manusia baik melekat dalam perasaan atau kesadaran sebagai hak asasinya ada nilai-nilai politik yakni nilai untuk bekerjasama sekaligus bersaing baik secara bersama atau terpisah. Sementara Socrates berpendapat terdapat tiga tipe jiwa manusia dan cara hidup manusia yang ada kaitannya dengan politik yaitu akal budi (*reason*), semangat (*spirit*), dan nafsu (*desire*). Ketiganya mencapai puncak kegiatan kalau setiap bagian aktif secara penuh di bawah pengarahan akal budi. Keadilan terwujud kalau setiap individu melakukan dengan baik apa saja yang sesuai

³² Fatur Rahman, Afi Nurul Febriyanti, Jihan Hidayah, “Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia,” *Aliansi : Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* Volume. 1 No. 3 (2024), Hal. 316. DOI: <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i3.229>.

³³ M.D. Wakkary, “*Siap Menghadapi Peperangan Rohani*,” (Pare: Dep. Lit. dan M.M. MP-GpDI, Thn 1996), Hal. 124-125.

³⁴ Richard Robison, & Soeharto, “*Bangkitnya Kapitalisme Indonesia*”, (Jakarta: Komunitas Bambu, Thn. 2012), Hal. 83.

³⁵ Maswadi Rauf, “*Konsensus Politik: Sebuah Penajagan Awal*,” (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Thn. 2000), Hal. 27-28.

dengan kemampuan dengan cara bekerjasama secara serasi di bawah pengarahannya yang paling bijaksana dari akal budi.³⁶

Gerry van Klinken sebagaimana dikutip oleh Kisno Hadi, mengatakan: Pasca Orde Baru adalah era baru dan semangat baru politik Indonesia setelah meredupnya rezim militeristik dan sentralistik Orde Baru. Oleh Klinken, pasca Orde Baru disebut era penegasan identitas yang cukup mengejutkan sekaligus dilematis. Mengejutkan karena era desentralisasi politik dan pemerintahan digalakkan, di mana proses desentralisasi dikonsepsikan oleh para perumus untuk efisiensi administrasi pemerintahan modern sekaligus menghadirkan demokrasi di tingkat lokal.

Sedangkan kebangkitan komunitarian tidak pernah diperhitungkan sebelumnya, tetapi malah menjadi bagian penting dari desentralisasi. Dilematis karena persoalan kebangkitan identitas berarti kebangkitan simbol-simbol kekuasaan sebelum republik ini berdiri yang merepresentasikan feodalisme.³⁷ Selain identitas komunitarian, identitas keagamaan juga mendapatkan penegasan.³⁸ Negara dan gereja melakukan hal yang sama dalam mencari identitas diri terbentuknya negara dan gereja yang mampu berdiri sendiri.

Kaum intelektual Kristen sesudah mereka, seperti Kasimo, Goenoeng Moelia, Ratu Langie, Amir Syarifuddin, Soegijapranata, Latumahina, hingga Leimena yang memilih pro terhadap gerakan revolusi kemerdekaan dengan bergabung bersama kaum nasionalis lainnya seperti Hatta, Sukarno, Tan Malaka, Agus Salim, Natsir, dll. Bahkan diantara mereka ada mendirikan partai politik Kristen (Parkindo) dan Partai Katolik guna memperjuangkan hak-hak kaum minoritas Kristen di masa pendudukan militer Jepang serta sesudah Proklamasi Kemerdekaan RI 1945.³⁹ Ini bagian keterlibatan gereja pada masa memperjuangkan hak-hak kaum sebagai minoritas dimasa penjajahan militer Jepang bergabung dengan negara sesudah proklamasi.

Kebebasan beragama dan keberadaan bangunan gereja, sejak masa Orde Baru sikap politik gereja atau umat Kristen umumnya memasuki babak baru. kebebasan menjalankan ibadah dan keberadaan bangunan gereja. Semasa Orde Baru (1966-1998) setidaknya ada 456 gereja dirusak, ditutup, dan diresolusi, sekitar 21 kasus diantaranya terjadi di Jakarta. Pada

³⁶ George H. Sabine, *"Teori-Teori Politik"*, (Jakarta: Penerbit Binacipta, 1963), 67- 96.

³⁷ Gerry van Klinken (a), *"Kembalinya Para Sultan: Pentas Gerakan Komunitarian Dalam Politik Lokal"*, dalam Jamie S. Davidson dkk. (Peny.), *Adat Dalam Politik Indonesia* (Jakarta: Buku Obor dan KITLV-Jakarta, Thn. 2010), Hal. 166.

³⁸ Kisno Hadi, *"Gereja Bertukar Jalan"* dalam Zakaria J. Ngelow, John Campbell-Nelson dan Julianus Mojau (Ed.), *Teologi Politik* (Makasar: Yayasan OASE INTIM, Thn 2013), Hal. 272.

³⁹ Jan S. Arifonang, *"Kiprah Kristen Dalam Sejarah Perpolitikan Di Indonesia"*, dalam *Jurnal Teologi Proklamasi*, Edisi No. 4/Th.2/September (2003), hal. 9-48

masa reformasi dan transisi demokrasi di bawah pemerintahan Habibie (1998-1999) angka pengrusakan gereja semakin meningkat. Setidaknya ada 156 gereja yang dirusak dalam dua tahun Kemudian di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2001) ada 232 gereja yang mengalami pengrusakan, lalu dalam pemerintahan Megawati (2001-2004) ada 68 gereja yang dirusak. Terakhir sejak 2004 hingga 2007 dalam pemerintahan Yudhoyono terdapat 108 gereja yang ditutup, dirusak dan diserang.⁴⁰ Di tahun orde baru gereja tidak ada kebebasan beroperasi atau bebas dalam beribadah. Justru gereja di rusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, itulah masa orde baru yang di alami gereja dalam perkembangan negara.

Era Reformasi dan Dinamika Kebebasan Beragama

Setelah berakhirnya Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia memasuki era Reformasi yang membuka jalan bagi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) secara lebih luas, termasuk kebebasan beragama. Amandemen UUD 1945 pada tahun 2000 memperkuat jaminan kebebasan beragama dengan memasukkan hak untuk tidak dipaksa memeluk suatu agama tertentu.⁴¹ Secara harfiah yang dimaksud dengan HAM adalah hak pokok atau hak dasar.⁴² HAM adalah hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak dipisahkan dari hakikat dan karena itu bersifat suci.⁴³

Menurut Miriam Budiardjo, HAM sebagai hak-hak yang dimiliki manusia yang telah diperolehnya dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya dalam kehidupan bermasyarakat.⁴⁴ Bambang Sunggono dan Aries Harianto berpendapat, bahwa HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat, jadi bukan berdasarkan hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia.⁴⁵ HAM adalah hak yang di miliki sejak lahir tetapi kenyataannya bukan lagi miliknya karena di kuasai oleh oknum tertentu sehingga kebebasan hidup, bekerja, berpendapat serta beragama tidak di miliknya lagi.

Marbangun Hardjowirogo merumuskan tentang HAM sebagai hak-hak yang memungkinkan kita untuk tanpa diganggu menjalankan hidup bermasyarakat dan bernegara

⁴⁰ Tim Peneliti Yayasan Paramadina, *MPRK-UGM dan ICRP, Kontroversi Gereja di Jakarta* (Yogyakarta: CRCS-UGM, 2011), 32-33

⁴¹ Faturrohman, Afi Nurul Febriyanti, Jihan Hidayah, "Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia," *Aliansi : Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* Volume. 1 No. 3 (2024), Hal. 316. DOI: <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i3.229>.

⁴² St. Harum Pujiarto, "*HAM di Indonesia Suatu Tinjauan Filosofis Berdasarkan Pancasila dan Permasalahannya Dalam Hukum Pidana*," (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1993), h. 25.

⁴³ Kuntjoro Purbopranoto, "*Hak-HAM dan Pancasila*," (Jakarta: Pradnya Paramita, 1969), h. 18-19.

⁴⁴ Miriam Budiardjo, "*Dasar-dasar Ilmu Politik*," (Jakarta: Gramedia: 1981), h. 120.

⁴⁵ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, "*Bantuan Hukum dan HAM*," (Bandung: Mandar Maju, Thn. 1994), hal. 70.

sebagai warga dari suatu kehidupan bersama.⁴⁶ Dalam perkembangannya HAM tidak lagi dipandang sekadar sebagai perwujudan paham individualisme dan liberalisme seperti dahulu. HAM lebih dipahami secara manusia sebagai hak-hak yang melekat dengan harkat dan hakikat kemanusiaan, apapun latar belakang ras, etnik, agama, warna kulit, jenis kelamin, usia atau pekerjaan.⁴⁷ Keberadaan HAM adalah hak mutlak yang dimiliki manusia sehingga kebebasan beragama tidak menghalangi masyarakat dalam berTuhan. Namun kenyataan berbanding terbalik, dimana masyarakat minoritas tidak memiliki kebebasan dalam berTuhan. Karena oknum tertentu menghambat pembangunan gedung ibadah bagi masyarakat minoritas dengan tidak mendapatkan ijin.

KESIMPULAN

Sejarah gereja di Indonesia menunjukkan bahwa kekristenan telah hadir sejak awal melalui hubungan perdagangan dan misi dari luar Nusantara, kemudian berkembang lebih luas pada masa kolonial Portugis dan Belanda. Kehadiran gereja tidak dapat dipisahkan dari dinamika kolonialisme, karena penyebaran agama Kristen sering berjalan berdampingan dengan kepentingan politik dan ekonomi penjajah. Walaupun demikian, gereja tetap menjadi sarana pemberitaan Injil dan membentuk komunitas orang percaya yang dipanggil keluar dari kehidupan lama menuju terang Kristus. Dalam perjalanan sejarahnya, gereja di Indonesia juga mengalami berbagai perubahan dan pergumulan, baik dalam bidang rohani, sosial, maupun hubungan dengan kekuasaan negara.

Selain itu, hubungan gereja dan negara dalam sejarah Indonesia mengalami perkembangan yang dinamis dari masa kolonial, awal kemerdekaan, Orde Baru, hingga era Reformasi. Pada masa kolonial, gereja sering berada di bawah pengaruh kekuasaan pemerintah penjajah dan bahkan menjadi bagian dari sistem kolonial. Setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1945, gereja mulai mengambil peran sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang mendukung negara Pancasila serta ikut terlibat dalam perjuangan nasional dan pembangunan masyarakat. Pada masa Orde Baru, relasi gereja dan negara diwarnai oleh pembatasan kebebasan beragama dan berbagai tekanan terhadap kelompok minoritas Kristen. Namun, gereja tetap berupaya menjalankan perannya dalam pendidikan, pelayanan sosial, moral, dan perjuangan keadilan bagi masyarakat.

Pada era Reformasi, kebebasan beragama semakin dijamin melalui penguatan Hak Asasi Manusia dan amandemen UUD 1945, meskipun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai tantangan seperti penolakan pembangunan rumah ibadah dan tindakan intoleransi

⁴⁶ Marbangun Hardjowirogo, *"Hak-hak Manusia,"* (Jakarta: Yayasan Idayu, Thn. 1981), hal. 7

⁴⁷ Saafaroedin Bahar, *"HAM Analisis Komnas HAM dan Jajaran Hankam ABRI,"* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Thn. 1996), hal. 6.

terhadap kelompok minoritas. Oleh sebab itu, hubungan gereja dan negara di Indonesia perlu terus dibangun berdasarkan nilai Pancasila, toleransi, keadilan, dan penghormatan terhadap keberagaman. Gereja tidak hanya berperan sebagai lembaga rohani, tetapi juga sebagai mitra negara dalam membangun persatuan, perdamaian, serta kehidupan masyarakat yang demokratis dan harmonis di tengah kemajemukan bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Halava, Yulina, dan Sormawati Lamal. "Sejarah Gereja di Indonesia: Peran Misionaris dalam Penyebaran Kekristenan." *Jurnal Silah Asah* 2, no. 1 (2025): 2. <https://doi.org/10.54765/salihasah>.
- Putra, Zulfikar, dan Farnd Waydi. *Buku Ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*. Malang: Ahlimedia Book, 2021.
- Graves, Allen W. "A Church At Work: A Handbook of Church Polity,". Nashville: Convention Press, 1972.
- Almahdali, Humairah. *Ilmu Negara*. Padang: CV. Gita Lentera, 2023.
- Berkhof, H., dan I. H. Enklaar. *Sejarah Gereja*. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 1999.
- Napel, Henk ten. "Kamus Teologi Inggris – Indonesia,". Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002.
- Denzin, Norman K., dan Yvonna S. Lincoln. *Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1994.
- Erickson, Frederick. "Qualitative Methods in Research on Teaching." *Dalam Handbook of Research on Teaching, disunting oleh Merlin C. Wittrock, 119–161*. New York: Macmillan, 1986.
- Kirk, John, dan Marc L. Miller. *Reliability and Validity in Qualitative Research*. Beverly Hills: Sage Publications, 1986.
- Subagyo, G. B. *Menuju Gereja Mandiri: Sejarah Keuskupan Agung Semarang di Bawah Dua Uskup, 1940–1951*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Sanata Dharma, 2005.
- Lamal, Suruwati, dan Yuslina Halawa. "Sejarah Gereja di Indonesia: Peran Minoritas dalam Penyebaran Kekristenan." *Jurnal Silih Asah* 2, no. 1 (2025): 2. <https://doi.org/10.54765/silihasah>.
- Ahmad, dkk. *Sejarah Nasional Indonesia*. Sumatera Barat: CV. Gita Lentera, 2024.
- Hutahaean, Wendy Sepmady. *Sejarah Gereja Indonesia*. Malang: Ahlimedia Press IKAPI, 2017.
- Pontonuwu, Williyanto. *Sejarah Gereja Indonesia*. Semarang: Tera Kata, 2019.
- De Jonge, Christian. *Gereja Mencari Jawab*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006.

- Hutapea, Spencer Ripelhot. *Buku Ajar Pendidikan Agama Kristen dan Katolik: Pengantar Sejarah, Dasar Teologis, Teori dan Aplikasi*. Jawa Tengah: PT Reformasi Jangkar Philosophia, 2026.
- Pontonuwu, Williyanto. *Sejarah Gereja Indonesia*. Semarang: Tera Kata, 2019.
- Assa, Changlie Harter. "Sejarah Lahirnya Gereja Kebangsaan di Minahasa: *The History of the Church of Nation in Minahasa*." *Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 1, no. 2 (2021): 108.
- De Jonge, Christian. *Sejarah Gereja Katolik Indonesia. Jilid 5*. Bandung: Kanisius, 2001.
- Van den End, Th. *Harta dalam Bejana*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012.
- Daulay, Richard M. *Agama dan Politik di Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015.
- Van den End, Th., dan J. Weitjens. *Ragi Carita 2: Sejarah Gereja di Indonesia 1860-an–Sekarang*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1999.
- Henley, David E. F. *Nationalism and Regionalism in a Colonial Context: Minahasa in the Dutch East Indies*. Canberra: Australian National University, 1992.
- Van den End, Th., dan J. Weitjens. *Ragi Carita 2: Sejarah Gereja di Indonesia 1860-an–Sekarang*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1999.
- Van Klinken, Gerry. *Minorities, Modernity and the Emerging Nation: Christians in Indonesia, a Biographical Approach*. Leiden: KITLV Press, 2003.
- Schouten, M. J. C. "Myth and Reality in Minahasan History: The Waworuntu–Gallois Confrontation." Paris: Archipel, 1987.
- Simatupang, T. B. *Realisme yang Berpengharapan*. Jakarta: Dewan Gereja-Gereja di Indonesia, 1981.
- Van den End, Th., dan J. Weitjens. *Ragi Carita 2: Sejarah Gereja di Indonesia 1860-an–Sekarang*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1999.
- Demmulder. *Menyongsong Tahun 2000*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1987.
- Wakkary, M. D. *Siap Menghadapi Peperangan Rohani*. Pare: Dep. Lit. dan M.M. MP-GPDI, 1996.
- Aritonang, Jan S. "Minat dan Pilihan Politik Orang Kristen Indonesia 1955–2009: Sebuah Kajian Historis Teologis." *Studia Philosophica et Theologica* 9, no. 2 (2009): 191–213.
- Faturohman, Afi Nurul, Febriyanti, dan Jihan Hidayah. "Kebebasan Beragama sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 3 (2024): 316.
<https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i3.229>.
- Robison, Richard, dan Vedi R. Hadiz. *Bangkitnya Kapitalisme Indonesia*. Jakarta: Komunitas Bambu, 2012.
- Wakkary, M. D. *Siap Menghadapi Peperangan Rohani*. Pare: Dep. Lit. dan M.M. MP-GPDI, 1996.
- Aritonang, Jan S. "Minat dan Pilihan Politik Orang Kristen Indonesia 1955–2009: Sebuah Kajian Historis Teologis." *Studia Philosophica et Theologica* 9, no. 2 (2009): 191–213.
- Faturohman, Afi Nurul, Febriyanti, dan Jihan Hidayah. "Kebebasan Beragama sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 3 (2024): 316.
<https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i3.229>.
- Robison, Richard, dan Vedi R. Hadiz. *Bangkitnya Kapitalisme Indonesia*. Jakarta: Komunitas Bambu, 2012.
- Wakkary, M. D. *Siap Menghadapi Peperangan Rohani*. Pare: Dep. Lit. dan M.M. MP-GPDI, 1996.
- Rauf, Maswadi. *Konsensus Politik: Sebuah Penajajaran Awal*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, 2000.
- Sabine, George H. *Teori-Teori Politik*. Jakarta: Penerbit Binacipta, 1963.
- Aritonang, Jan S. "Kiprah Kristen dalam Sejarah Perpolitikan di Indonesia." *Jurnal Teologi Proklamasi*, no. 4, Th. 2 (September 2003): 9–48.

- Hadi, Kisno. *"Gereja Bertukar Jalan."* Dalam Teologi Politik, disunting oleh Zakaria J. Ngelow, John Campbell-Nelson, dan Julianus Mojau, 272. Makassar: Yayasan Oase Intim, 2013.
- Van Klinken, Gerry. *"Kembalinya Para Sultan: Pentas Gerakan Komunitarian dalam Politik Lokal."* Dalam Adat dalam Politik Indonesia, disunting oleh Jamie S. Davidson dkk., 166. Jakarta: Buku Obor dan KITLV-Jakarta, 2010.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 1981.
- Faturohman, Afi Nurul, Febriyanti, dan Jihan Hidayah. *"Kebebasan Beragama sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia."* Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora 1, no. 3 (2024): 316.
<https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i3.229>.
- Purbopranoto, Kuntjoro. *Hak-Hak Asasi Manusia dan Pancasila*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1969.
- Pujiarto, St. Harum. *HAM di Indonesia: Suatu Tinjauan Filosofis Berdasarkan Pancasila dan Permasalahannya dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1993.
- Sunggono, Bambang, dan Aries Harianto. *Bantuan Hukum dan HAM*. Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Tim Peneliti Yayasan Paramadina, MPRK-UGM, dan ICRP. *Kontroversi Gereja di Jakarta*. Yogyakarta: CRCs-UGM, 2011.
- Bahar, Saafroedin. *HAM: Analisis Komnas HAM dan Jajaran Hankam ABRI*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Hardjowirogo, Marbangun. *Hak-Hak Manusia*. Jakarta: Yayasan Idayu, 1981.